

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu asas metafisik mengatakan bahwa *agere sequitur esse* (cara segala aktifitasnya sesuai dengan cara berada).<sup>1</sup> Pohon bertumbuh, anjing menyalak, ikan berenang, burung mengepakkan sayap di angkasa dan manusia bergiat dan berpikir menunjukkan cara ia berada. Beragam bentuk kegiatan yang menandakan ciri keberadaan manusia sebagai manusia. Salah satunya adalah kemampuan untuk menguasai. Menguasai adalah aktivitas eksistensial manusia yang turut menentukan keberadaannya. Kekuasaan dalam konsep tradisional merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak penguasa yang sering dipandang represif, koersif dan opresif.<sup>2</sup> Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan memberi keputusan- keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya.

Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Wirtschaft Undgesellschaft* mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Bagi Weber kekuasaan itu bersifat egois.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Lukes seorang sosiolog kondang menandakan bahwa inti umum dari semua konsepsi kekuasaan bisa dijumpai dalam gambaran seorang agen yang mempengaruhi agen

---

<sup>1</sup> Adelbert Snijders, *Anthropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*, (Jogjakarta: Kanisius 2004), hlm. 89.

<sup>2</sup> Eduardus Dosi, *Media Masa Dalam Jaring Kekuasaan*, (Maukere: Ledalero, 2012), hlm. 23.

<sup>3</sup> [kekuasaan menurut max Weber - Search \(bing.com\)](#) diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 12.00. WITA.

lainnya.<sup>4</sup> Kekuasaan dalam pandangan tradisional bersifat hierarki satu arah, dari atas ke bawah (*up-down*), dan berciri sentralistik yakni dikendalikan oleh satu atau sekelompok orang. Tak pelak, bahwa praktik kekuasaan yang demikian rentan terjadi konflik. Konflik biasanya berawal dari sikap penguasa yang totaliter terhadap kaum yang dikuasai demi melanggengkan *status quo*. Sistem kekuasaan totaliter itu tampak jelas pada praktik legalisme yang berujung pada titik penyingkiran eksistensi manusia sebagai subyek kekuasaan itu sendiri. Sistem kekuasaan yang demikian adalah tanda bahwa adanya degradasi moral dari penguasa. Meskipun praktik penyelewengan kekuasaan adalah bentuk kemerosotan moral penguasa, namun bukan menjadi alasan untuk tidak ditelaah.

Diskursus seputar lingkaran kekuasaan merupakan suatu hal menarik yang menyedot perhatian para ahli pikir. Merefleksikan hakikat kekuasaan yang telah, sedang dan akan terjadi merupakan sebuah kekwatiran yang giat didengungkan dalam layar intelektual disepanjang bentangan sejarah peradaban manusia.<sup>5</sup> Ini adalah sebuah aksioma historis. Realitas membuktikan bahwa hingga saat sekarang manusia memberikan atensi supreme terhadap wacana kekuasaan. Manusia menyibukan pikirannya dalam menelusuri regeneratif kekuasaan, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan itu turut memberi arah yang menentukan bagi keberadaan dan perkembangan manusia dalam segala aspek kehidupannya.

Gambaran mengenai pengaruh kekuasaan terhadap lajur peradaban manusia bisa ditemukan catatan sejarah pada segala masa. Kendati demikian, kekuasaan tidak wajib dimaknai secara seragam dalam setiap masa. Kekuasaan juga dapat dimaknai sesuai konteks dan arah pemikiran pada zamannya. Konsep kekuasaan pada Era Yunani klasik selain memberi dasar terhadap refleksi

---

<sup>4</sup> John Gray, "Kekuasaan Politik, Teori Sosial dan Pertaruhan Nilai-Nilai" dalam David Miller Larry Siedentop (ed.), *Politik Dalam Perspektif Pemikiran Filsafat Teori*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 126.

<sup>5</sup> John Gray, *Op. Cit.*, hlm. 129.

kekuasaan Modernisme, juga memiliki konsep kekuasaan tersendiri yang barangkali berbeda dengan paham kekuasaan Modern. Pada zaman Yunani sistem kekuasaan umumnya berciri totaliter. Sistem pemerintahan yang menyerupai totalitarianisme diterapkan di negara bagian Sparta di bawah komando raja Leonidas. Plato menggambarkan masyarakat totaliterisme Yunani kuno itu berbasis kasta yang kaku dimana warganya melayani negara dan bukan adanya negara untuk masyarakat. Tulisan Plato dalam bukunya *politeia* (Republik) menguraikan suatu dialog intens antara Sokrates dan Trasymachos. Trasymachos melontarkan pendapat sinis bahwa penguasa adalah seorang diktator yang memaksakan kepada rakyat sebagai hukum yang adil apa yang sebenarnya menguntungkan bagi dirinya sendiri.<sup>6</sup> Pada masa Plato, Yunani terbagi dalam sejumlah negara kota otonom yang terus-menerus dalam keadaan perang. Negara-negara kota mempunyai sistem politik antara lain, demokrasi, aristokrasi, (pemerintah oleh suatu kelas) dan monarki. Plato ingin melihat berakhirnya perang, ia tidak menyukai nilai-nilai kehormatan dan kejayaan yang datang dari pertempuran. Ia mencari tatanan masyarakat yang dibangun dimana orang-orang dapat hidup dalam damai dan harmoni, menjalani hidup secara penuh.<sup>7</sup>

Sistem kekuasaan totaliter juga terjadi di Tiongkok kuno, pada mazhab Dinasti Qin (221-206 SM) di bawah pimpinan kaisar chi'in yang kejam dan lalim.<sup>8</sup> Dinasti Qin diatur oleh filosofi legalisme, dimana aktivitas politik hampir dilarang, semua literatur dihancurkan, dan mereka yang menentang atau mempertanyakan legalisme dieksekusi. Dalam kedua masa ini pranata sosial ditentukan oleh penguasa. Penguasa (kaisar/raja) memiliki otoritas absolut dalam menentukan batas-batas kebenaran dan pengetahuan sebagai standarisasi dalam berperilaku. Raja atau kaisar

---

<sup>6</sup> Frans Magnis-Suseno, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 13.

<sup>7</sup> P. Hardono Hadi, *Ide-Ide: Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, (penerj.), dari buku Linda Smith dan William Raeper *A Beginner's Guide to Ideas* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 105.

<sup>8</sup> Asim Gunawan, "Reaksi Subyektif terhadap Kata Cina dan Tionghoa: Pendekatan Sosiologis Bahasa", dalam I. Wibowo (ed.), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 33.

dipandang oleh masyarakat sebagai pribadi bijaksana yang harus dihormati dan ditaati. Stereotipe kebijaksanaan yang disematkan pada diri kaisar dan raja itu mempertebal keyakinan bahwa melawan kaisar/raja dianggap pengkhianat yang siap diadili bahkan dieksekusi secara langsung oleh raja atau kaisar.

Pada Abad Pertengahan bentuk absolutisme penguasa semakin kokoh dengan terjadinya perselingkuhan mesra antara totalitarisme politis, absolutisme agama dan monarki absolutisme. Hegemoni ketiga institusi raksasa tersebut berhasil mendominasi sirkulasi kehidupan manusia dengan menekankan ciri koersif, represif dan represif dari kekuasaan. Bentuk kekuasaan represif yang paling menonjol termanifestasi di dalam kekuasaan Gereja. Gereja memiliki kuasa dan kekuatan mengikat atas setiap tingkah laku manusia, termasuk kegiatan berpikir. Pandangan mengenai hukum dan negara sepenuhnya dilandasi pada konsep teokratis. Narasi publik yang dibangun dan dihidupi oleh penguasa Gereja adalah setiap orang yang melawan kehendak Gereja dianggap bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Sebab, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati selain perintah Tuhan.<sup>9</sup> Bahkan dimasa ini kebenaran ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan menuju neraka. Penguasa Gereja secara eksklusif mereduksi kebenaran ilmu pengetahuan ke dalam otoritas Gereja. Sikap Gereja yang mengkaplingkan kebenaran di bawah otoritasnya semata memantik gejala intelektual.

Pemberontakan intelektual terhadap hegemoni kekuasaan Gereja yang mendominasi dapat menempatkan manusia kepada sistem pemikiran baru yakni zaman modern (*Latin moderna* artinya sekarang/kekinian). Paham kekinian yang menyebar di mana-mana itu terbukti mampu menepis konsep lama yang tidak menyadari akan keberadaan “ada” disaat ini. Lebih tepat mengatakan bahwa orang sebelumnya kurang menyadari bahwa manusia bisa mengadakan

---

<sup>9</sup> Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 44.

perubahan-perubahan yang secara kualitatif baru. Kebaruan (*newness*) yang ditampilkan modernitas terkait erat dengan kesadaran akan konsep subyektifitas, kritik dan kemajuan yang menjadi kekhasan dan standar refleksi filosofis.<sup>10</sup>

Di Era Modern praktik kekuasaan totaliter terus dijalankan. Totalitarianisme mencapai puncaknya dalam praktik-praktik Naziisme dan stalinisme<sup>11</sup>. Kedua rezim ini adalah representatif kebobrokan moralitas penguasa yang memeralat kekuasaan untuk memuaskan kepicikan birahi berkuasa. Instrumentalisasi kekuasaan demi tujuan melegalkan tindakan imperatif dan penyingkiran eksistensi *animal rationale* (manusia) adalah bentuk krisis kekuasaan dan malapetaka kemanusiaan. Hannah Arendt mengatakan bahwa krisis kekuasaan itu berkelindan dengan krisis berpikir.

Wahana pemikiran Arendt menampakan keterkaitan antara kekuasaan dengan sistem berpikir manusia. Arendt mengafirmasi bahwa pada hakikatnya manusia adalah entitas rasional yang memiliki akal pikiran untuk menimbang dan memutuskan segala sesuatu termasuk segala bentuk sistem kekuasaan. Adanya fakta yang dianggap krisis kekuasaan bagi Arendt tidak terlepas dari intervensi berpikir manusia. Oleh karena itu Arendt sendiri berupaya merefleksikan fenomena krisis kekuasaan yang dijalankan pada masanya.

Mendengung krisis kekuasaan yang dihadapi, mendorong Arendt membunting suatu gagasan yang akhirnya melahirkan sebuah paradigma baru tentang kekuasaan yaitu, paradigma komunikasi. Pertanyaan dasar Arendt bukanlah “mengapa rezim totaliter tumbang” melainkan mengapa muncul rezim totaliter.<sup>12</sup> Argumentasi Arendt yang cukup brilian adalah bahwa rezim totaliter muncul dari ketiadaan berpikir orang-orang, atau krisis berpikir. Aksentuasi pemikirannya

---

<sup>10</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 3.

<sup>11</sup> Rikardus Rahmat, “Krisis Kekuasaan Sebagai Krisis Berpikir”, dalam Jurnal Filsafat *DRIYARKARA* Edisi Th. XXVI., No. 1, September 2002, (Jakarta: Driyarkara Press, 2002), hlm. 63.

<sup>12</sup> Rikardus Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 65.

jelas pada upaya mengaktuskan potensi berpikir lewat komunikasi agar bisa menggalang solidaritas yang bermuara pada kekuasaan. Arendt secara eviden mendemonstrasikan kekhasan manusia sebagai entitas rasional dengan memposisikan wacana kekuasaan ketataran rationalitas. Hingga kini, memasuki zaman baru yang disebut posmodern, refleksi mengenai kekuasaan pun semakin nyaring dikumandangkan oleh manusia. Pelbagai argumentasi terkait dengan kekuasaan tetap terus digemakan oleh ahli pikir hingga hari ini. Keseriusan dalam menemukan makna kekuasaan adalah bukti bahwa kekuasaan adalah suatu aspek hakiki dalam kehidupan manusia yang mesti mendapat porsi perhatian yang selayaknya. Pada galibnya, kekuasaan merupakan suatu anasir asasi yang inheren pada diri manusia.

Nietzsche seorang pemikir spektakuler mengafirmasi bahwa kesejatian eksistensi manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Nietzsche secara agresif meneropong cukup jauh kehidupan manusia dari aspek aktusnya. Konsep Nietzsche yang progresif ini sebenarnya diinspirasi oleh tesis Arthur Schopenhauer yang mengartikan hidup manusia sebagai kehendak untuk hidup (*the will to live*). Nietzsche menyanggah pemikiran Schopenhauer dengan melihat kehidupan manusia dari tindakannya yang sering mengambil resiko demi penyebaran kekuasaan dalam berbagai variasi bentuk seperti; kekayaan, ketenaran, aktualisasi atau kepentingan ekonomi yang mempunyai dorongan tidak hanya sekedar kehendak untuk hidup (*will to live*), tetapi lebih cocok dipandang sebagai kehendak untuk berkuasa (*the will to power*).<sup>13</sup>

Nietzsche optimis, memproklamirkan bahwa kehendak berkuasa merupakan hakikat dari dunia, hidup dan ada. Semua motif tindakan manusia selalu berasal dari kehendak itu. Karena itu, keinginan untuk hidup (*will to live*) ada karena adanya kehendak berkuasa. Bagi Nietzsche untuk dapat hidup dengan penuh eksistensi dan vitalitas, manusia harus memperlakukan hidupnya

---

<sup>13</sup> Kumara Ari Yuana, *100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM- Abad 21 Yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 285.

sebagai kehendak untuk berkuasa. Dengan itu, manusia akan memegang kendali penuh atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia akan memiliki mentalitas tuan yang berkarakter berani, agung dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya.<sup>14</sup> Sementara Karl Marx menganalisis konsep kekuasaan itu dengan teori materialisme dialektik. Pandangan Marx sesungguhnya dipengaruhi oleh filsafat Hegel yang membahas soal ide-ide. Intisari ajaran Hegel adalah setiap perubahan terjadi lewat apa yang disebut proses dialektik. Proses dialektik Hegelian terpaku dengan kuat dalam pikiran Marx.<sup>15</sup> Akan tetapi, Marx juga melakukan kritik tajam atas konsep dialektika Hegel. Menurut Marx, konsep dialektika Hegel adalah sesuatu yang masih melayang-layang di udara.<sup>16</sup> Ia mendaratkan filsafat dialektika Hegel itu pada kenyataan sosio-ekonomis yang serba kontradiktoris.<sup>17</sup> Kemudian, Marx mencocokkan konsep dialektik Hegelian kedalam proses evolusi sosial yang didasarkan pada kepentingan manusia akan hal-hal materiil.<sup>18</sup> Baginya, aktivitas produksi yang menjadi basis dari segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

Ciri yang paling menentukan sebuah bentuk aktivitas produksi sampai sekarang adalah pemisahan antara kelas pemilik modal (*borjuis*) dengan kelas pekerja (*proletar*). Kelas pemilik modal adalah mereka yang memiliki dan menguasai sarana-sarana kerja, sedangkan kelas pekerja adalah mereka yang hanya memiliki tenaga kerja. Kaum pekerja (*proletar*) tidak mempunyai kuasa sama sekali atas sarana-sarana produksi. Maka, tidak mengherankan jika kelas pemilik modal melakukan penghisapan dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang.

Marx menyimpulkan bahwa sejarah umat manusia selalu diwarnai oleh perjuangan dan pertarungan antar-kelas. Kelas yang bertentangan itu tidak lain adalah kelas pemilik modal

---

<sup>14</sup> Frans Kowa, *Nietzsche dalam 90 Menit* (penerj.), dari buku Paul Strathern *Nietzsche in 90 Minutes*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 48-50.

<sup>15</sup> Jon Elster, *Karl Marx*, (Jakarta: Pustakaraya, 2000), hlm. 49.

<sup>16</sup> Abdul Hakim, "Foucault dan Kritik atas Marxisme" dalam majalah *DRYARKARA* Th. XXIV., no. 4, Agustus 2000 (Jakarta: Seksi Publikasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2000), hlm. 49.

<sup>17</sup> Jon Elster, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>18</sup> T. Gilarso, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 87.

(penindas) dan kelas pekerja (yang ditindas).<sup>19</sup> Kelas atas berjuang untuk mempertahankan dominasi kedudukannya terhadap kelas bawah. Sebaliknya, kelas bawah berupaya semampu mereka untuk menghancurkan kekuasaan kelas atas yang telah menindas mereka. Pertentangan ini kemudian menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan bahkan revolusi yang berlangsung dalam waktu singkat. Hasilnya adalah terbentuknya sebuah struktur kekuasaan baru, yang mendominasi kelas yang kalah dalam pertentangan tersebut. Menurut Marx sampai kapanpun struktur kekuasaan tindas-menindas tidak pernah berakhir.<sup>20</sup> Konsep kekuasaan Marx penting diperlihatkan dalam tulisan ini karena pemikiran Marx memberi andil dalam analisis Michel Foucault mengenai korelasi kekuasaan dengan pengetahuan.

Kajian kekuasaan Foucault sebagian besar berangkat dari penilaiannya terhadap konsep kekuasaan Marx yang cenderung menempatkan kekuasaan dalam lingkaran perspektif makrostruktur. Ia tidak membatasi dirinya hanya pada persoalan ekonomi, tetapi lebih memfokuskan uraiannya tentang kekuasaan pada tingkat institusi sosial. Kekuasaan baginya bukan menjadi milik individu ataupun kelompok tertentu melainkan menyebar. Kekuasaan itu terletak di mana-mana (*omnipresent*), tidak bisa dimiliki dan selalu ada dalam suatu matrix hubungan dengan kekuasaan yang lain.

Foucault sangat tertarik dengan kekuasaan yang bersifat mikrostruktur yang menekankan teknik-teknik koersif minor. Kekuasaan karena itu bukan saja bersifat negatif dan represif, melainkan bersifat produktif karena dapat menghasilkan suatu pengetahuan dalam jejaring relasi yang dibangun. Foucault menegaskan demikian:

*“But it seems to me now that the notion of repression is quite inadequate for capturing what is precisely the productive aspect of power. In defining the effects of power as repression, one adopts a purely juridical conception of such power, one identifies power with a law which says no, power is taken above all as carrying the force of a prohibition. Now I believe that this is a wholly negative,*

---

<sup>19</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 269.

<sup>20</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Mauere: Ledalero, 2013), hlm. 29.

*narrow, skeletal conception of power, one which has been curiously widespread. If power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no, do you really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn't only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network which runs through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression.<sup>21</sup>*

Foucault bahkan tidak hanya sekedar melihat kekuasaan sebagai faktum nonrepresif tetapi Foucault juga menampilkan keterkaitan erat hubungan kekuasaan dengan pengetahuan yang secara simultan mempengaruhi eksistensi dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri. Foucault menegaskan bahwa kuasa berkelindan dengan pengetahuan. Pengetahuan muncul melalui relasi-relasi kuasa yang menandai hubungan subyek dan bukannya subyek mengenal. Baginya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.<sup>22</sup>

Pandangan Foucault mengenai relasi kekuasaan dengan pengetahuan dilihat oleh peneliti sebagai warna baru terhadap konsep kekuasaan. Kebaruan konsep kekuasaan Michel Foucault itulah yang menginspirasi dan mengundang decak kagum peneliti untuk menggali secara komprehensif orisinalitas pemikirannya di bawah judul: ***INTERKONEKSI KEKUASAAN DENGAN PENGETAHUAN MENURUT MICHEL FOUCAULT.***

## **1.2 Perumusan Masalah**

---

<sup>21</sup> Colin Gordon, *Power Knowledge selected Interviews and other Writings*, (New York: Pantheon books, 1977), hal. 119. “Namun saat ini saya mulai merasakan bahwa istilah represi tidak cukup mengungkapkan makna sebenarnya dari aspek produktif kekuasaan. Dalam mendefinisikan efek-efek kekuasaan sebagai represi orang harus mengadopsi konsep yuridis murni mengenai kekuasaan, mengidentifikasinya dengan hukum yang berkata tidak karena kekuasaan sendiri, di atas semuanya mengandung kekuatan-kekuatan larangan sekarang saya percaya bahwa secara keseluruhan konsep kekuasaan seperti ini benar-benar negatif, sempit, picik, dan tersebar luas secara aneh. Jika kekuasaan bukan apa-apa selain represi, jika ia tidak melakukan apa-apa selain berkata tidak apakah anda benar-benar dapat menuntun orang untuk mematuinya? Apa yang membuat kekuasaan terlihat baik, apa yang membuatnya diterima adalah fakta sederhana bahwa ia tidak hanya hadir di depan kita sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintas dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana. Ia perlu disadari sebagai jaringan produktif yang bekerja diseluruh lembaga sosial, lebih daripada sekedar sebuah lembaga instansi negatif yang berfungsi represif”. Bandingkan terjemahan Yudhi santosa, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 147-148.

<sup>22</sup> James Bernauer dan Dave Rasmussen, (ed.) *The Final Foucault*, (Cambridge: The MIT Press, 1988), hlm. 12-15

Peneliti berusaha merumuskan beberapa pokok persoalan yang akan dielaborasi, antara lain:

- 1.2.1 Apa konsep kekuasaan menurut Michel Foucault?
- 1.2.2 Bagaimana konsep pengetahuan Menurut Michel Foucault?
- 1.2.3 Bagaimana Hubungan Timbal-Balik (interkoneksi) Kekuasaan Dengan Pengetahuan Menurut Michel Foucault?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Inventarisasi**

Penulis berusaha menyusun sebuah pola pemaknaan atas konsep Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan Menurut Michel Foucault, dengan bertolak dari karya-karya yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi. Dari berbagai sumber yang terkumpul akan dipelajari, diteliti serta dianalisa, termasuk karya-karya penulis lain yang berbicara tentang pemikiran Michel Foucault mengenai Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan.

#### **1.3.2. Evaluasi Kritis**

Dalam penelitian ini pemikiran Michel Foucault mengenai Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan akan digali dengan cermat. Dalam penggalian yang dilakukan oleh peneliti terhadap konsep Michel Foucault ini, peneliti akan membuat perbandingan dengan ahli dan pikiran dari penulis-penulis lain, kemudian akan menyertakan di dalamnya beberapa catatan dan evaluasi kritis atas konsep Michel Foucault tersebut.

#### **1.3.3. Sintesis**

Berpijak pada inventarisasi dan evaluasi kritis, penulis akan melengkapi pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh pengarang-pengarang lainnya. Tentu ada pendapat yang dilengkapi

dan melengkapi. karena itu, peneliti akan membuat sebuah sintese yang menyimpulkan segala anasir yang baik dan memperkecil hal-hal yang tidak relevan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Akademis**

Tulisan ini merupakan karya penulis dengan tujuan; selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam bidang Ilmu Filsafat, karya ini juga sebagai kongkretisasi kesadaran penulis sebagai eksponen akademisi, yang bermuara pada bentuk kontributif sederhana terhadap wahana pemikiran filosofis yang membentang luas. Hasrat yang meletup dalam rangkain kata yang tertuang dalam karya ini adalah sebentuk upaya partisipatif penulis dalam membentuk pikiran dan tindakan yang bercita rasa ilmiah. Penulis beritikad untuk menaburkan butir-butir pemikiran yang brilian dari Michel Foucault mengenai hubungan kekuasaan dengan pengetahuan ke tengah lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian meroket pada masyarakat dewasa ini.

### **1.4.2. Institusional**

Karya ini merupakan sebuah proses pencharian pengetahuan secara ilmiah dalam upaya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan secara integral. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pembentukan citra ilmiah Lembaga Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang secara umum dan Fakultas Filsafat secara khusus. Kiranya tulisan ini dapat memberi kontribusi yang memiliki kualitas yang berguna dan menjadi titik acuan bagi mahasiswa/i Fakultas Filsafat dalam membuka horizon berpikir mengenai konsep yang terurai dalam tulisan ini, serta menambah khasanah kepustakaan Filsafat terkait pemikiran Perancis kontemporer yang tengah menjamur dalam dunia intelektual dewasa ini.

### **1.4.3 Personal**

Penulis menyadari tulisan yang dibuat tidak sekedar pemenuhan syarat kelulusan menjadi strata satu dalam ilmu filsafat. Tulisan ini juga dapat dijadikan wadah bagi penulis dalam mengolah dan menajamkan kemampuan penulis untuk merumuskan pikiran secara kritis, metadis, sistematis dan reflektif. Penulis menyadari wadah ini adalah salah satu tempat yang efektif dan efisien untuk mengoptimal kemampuan penulis dalam meramu dan menenun gagasan.

### **1.4.4 Sosial**

Penulis beritikad untuk menampilkan kembali kekhasan khasanah Pemikiran Michel Foucault perihal Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan ke dalam ranah diskursif akademis. Penulis mencoba mendorong butir-butir pemikiran filosofis Michel Foucault ke lingkup sosial supaya bisa berkontribusi positif bagi masyarakat secara luas. Konsep Foucault ini tidak hanya sebuah pengetahuan konseptual atau teori meluluh melainkan, konsep ini dimaksudkannya agar masyarakat lebih memahami dan menyadari akan berbagai kenyataan yang mengitari hidupnya, secara khusus terkait fakta adanya Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan yang tengah menguasai kehidupan.

### **1.4.5 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis tulisan ini terkomposisi atas lima bab. Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah yang membingkai keseluruhan penulisan, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan karya ini. Dalam bab II, peneliti akan membeberkan biografi dari Michel Foucault, karya-karyanya secara kronologis dan berbagai latar belakang pemikiran yang mempengaruhi corak berpikir Michel Foucault.

Bab III; berisi kajian mengenai gambaran umum pemikiran filosofis yang berkaitan dengan Kekuasaan dan Pengetahuan Menurut Michel Foucault. Penulis membahas beberapa pemikiran penting sembari melihat keterkaitannya dengan konsep Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan dalam pemikiran filosofis Foucault. Selanjutnya penulis menggambarkan secara singkat metode arkeologis pengetahuan dan metode genealogis pengetahuan menurut Michel Foucault. Bab IV berisi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Pada bab ini, penulis berusaha mengkaji Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan Menurut Michel Foucault. Kekuasaan Dengan Pengetahuan dalam bingkai pemikiran Michel Foucault berkorelasi secara mutualis dengan saling memproduksi satu sama lain. Kekuasaan melahirkan pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan dapat menopang kekuasaan.

Pasang-surut relasi kekuasaan dengan pengetahuan mewarnai dinamika sejarah peradaban manusia yang terus berkembang seiring dengan perguliran waktu pada setiap zaman. Analisis Foucault mengenai Interkoneksi Kekuasaan Dengan Pengetahuan bersumber dari fenomena mikrostruktur seperti; kegilaan, kedokteran, seksualitas dan penjara yang diuraikan dalam bagian terakhir dari bab empat. Bagian akhir dari tulisan ini adalah bab V, berisi kesimpulan, pandangan penulis mengenai konsep kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault dan analisis kritis mengenai relevansi konsep Michel Foucault dalam konteks kehidupan dewasa ini, khususnya pada masa pandemi covid-19 yang sedang melanda bumi.